**PENGARUH BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH, PENYERAPAN TENAGA KEJA DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**Erlina Lumbanraja1 Evi Savitri Harianja2 Alexandra Hukom3**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

*Email: Erlinalumbanraja21@gmail.com*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Belanja modal pemerintah daerah, tenaga kerja terserap, dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel eksogen, sementara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan sebagai variabel endogen. Penelitian ini menggunakan data panel yang menggabungkan data time series dan cross section. Data ini dianalisis dengan menggunakan path analysis dengan SPSS 26 Program. Hasil penelitian untuk sub 1; menunjukkan secara parsial BM, TKT, dan IPM terhadap PE dan sub 2 BM, TKT, IPM dan PE terhadap kemiskinan tidak berpengaruh di Kalimantan Tengah. Secara simultan untuk penelitian sub 1 BM, TKT, dan IPM terhadap PE tidak berpengaruh sedangkan hasil substruktural 2; variabel BM, TKT, IPM dan PE berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Tengah.

**kata kunci *:* Pertumbuhan Ekonomi, Kemisinan, Belanja Modal, Tenaga Kerja Dan Indeks Pembangunan Manusia**

**Abstrack**

The study aims to test the Impact of Regional Government Capital Expenditure, Labour Absorption and Human Development Index on Economic Growth and Poverty in districts/cities in Central Kalimantan Province. The study uses secondary data, namely Local government capital expenditure and absorbed labour force, and the human development index as exogenous variables, while economic growth and poverty as endogenic variables. This study uses panel data that combines time series and cross section data. This data is analyzed using path analysis with SPSS 26 Program. Research results for sub 1; showed partially BM, TKT, and IPM against PE and sub 2 BM, tKT, IPM and PE against poverty have no influence in Central Kalimantan. Simultaneously for research sub 1 BM,TKT,and IPM on PE have no impact while sub-structural results 2; variables BM,tKT,IPM, and PE have a positive and significant influence on poverty in central Kalimantana.

**Keywords: *economic growth, prosperity, capital expenditure, labour and human development index***

**LATAR BELAKANG**

 Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam periode waktu tertentu. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, sosial budaya, dan perkembangan teknologi. Pertumbuhan ekonoi dapat diukur melalui indikatoe-indikator seperti produk nasional bruto (PDB), pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja, dan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi adalah faktor yang penting dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat dan merupakan alat ukur untuk melihat atau menganalisa seberapa jauh perekonomian suatu daerah berkembang. Tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah terus meningkat, yang sekarang mencapai 14,9%.

 Ishengoma & Robert (2006) menyebutkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang negatif akan meningkatkan pengangguran dan angka kemiskinan. Maka dari itu, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin tercapai penurunan kemiskinan (Bibi, 2006). Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tenga telah dilaksanakan dengan berbagai program dan oleh berbagai sektor dengan kriteria sasaran yang berbeda-beda. Dengan demikian pelaksanaan paket kegiatannya berjalan mengedepankan konsep sektoral, sehingga terintegrasi, bersinergi dan terkoordinasi. Ada tiga strategi utama yang harus dilakukan dalam menanggulangi masalah kemiskinan yaitu bantuan sosial seperti memberikan akses bagi rumah tangga miskin untuk mendapatkan pelayanan baik itu pendidikan, kesehatan, air bersih dan kebutuhan gizi, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat miskin agar mampu meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik lagi dan yang terakhir adalah memberikan bantuan berupa kredit bagi usaha ekonomi mikro dan kecil (Putra & Budhi, 2015).

 Pembangunan akan berjalan baik apabila rencana penganggaran pembangunan dilakukan dengan cermat yang ditopang oleh sumber-sumber pendapatan daerah yang telah dikelola dengan baik. Salahsatu tujuan perencanaan pembangunan yang baik adalah meningkatkan kesejahteran masyarakat atau dengan kata lain mengubah kondisi kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Salah satu masalah dalam pembangunan adalah kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi persoalan yang kompleks dalam suatu daerah atau negara, termasuk di Indonesia sebab kemiskinan merupakan masalah yang berifat multidimensional dan multisektor. Era otonomi daerah memberikan peluang yang besar bagidaerah untuk berkembang dan maju sesuai dengan kekayaan sumber daya yang terkandung didaerah masing-masing. Namun tak dipungkiri keberlangsungan otonomi daerah masih sangatbergantung dari dana pemerintah berupa dana perimbangan yang selalu di transfer olehpemerintah daerah ke seluruh daerah diIndonesia pada setiap tahun anggaran. Anggaran yangditransfer pemerintah pusat ke daerah akan menjadi sumber anggaran dan belanja yang palingbesar dibanding pendapatan asli daerah. Oleh karena itu sudah seharusnya pengelolaan anggarandan belanja yang disusun dalam berbagai perencanaan pembangunan di daerah pada akhirnyamampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, antara lain mampu mengurangi tingkat kemiskinandi daerah.

 Hal yang penting untuk dilihat adalah sejauh mana pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah mampu memberikan pengaruh dan dampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang signifikan dari tahun ke tahun.Semangat otonomi daerah harus mampu memberdayakansegenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakatnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. (Darise, 2006 : 14). Pembelanjaan yang dilakukan pemerintah daerah sudah seharusnya mampu mengurangi masalah kesejahteraan yang masih membelit sebagian masyarakat yakni kemiskinan. Pos-pos belanja yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan rakyat harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.Sesuai dengan aturan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah maka pos-pos yang paling vital menyentuh langsung kesejahteraan rakyat adalah Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal. Belanja bantuan sosial memang dikhususkan untuk meningkatkan kesejahateraan masyarakat baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan seperti aset daerah, infrastruktur, sarana dan prasarana dasar di daerah. Oleh karena itu peran kedua jenis belanja ini sangat penting sebab jika belanja bantuan sosial danbelanja modal disalurkan tepat sasaran dan mengalami peningkatan setiap tahunnya makadiharapkan akan memberikan pengaruh terhadap kesejahteran masyarakat terutama mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

**KAJIAN TEORITIS**

**Pertumbuan Ekonomi**

 Menurut Kuznets dalam Todaro (2003) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Todaro (2003) menyampaikan ada tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Pertama, akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal manusia atau sumberdaya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk yang selanjutnya akan menambah jumlah angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi yaitu berupa cara-cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani suatu pekerjaan. suatu pekerjaan.

**Kemiskinan**

 Kemiskinan itu mengandung unsur ruang dan waktu, untuk mendefinisikan kemiskinan itu tidaklah mudah. Konsep kemiskinan pada zaman perang akan berbeda dengan konsep kemiskinanpada zaman merdeka dan modern sekarang ini. Prespektif ini mengelompokkan makna kemiskinanmenjadi beberapa kelompok dan beberapa diantaranya : kelompok pertama, yang memandangkemiskinan dari sisi pendapatan (income-poverty), kelompok kedua, yang memaknai kemiskinan darikekurangan materi, kelompok ketiga, mengacu pada pendapatan Amartya Sen (Kotambunan et al.,2016). Ada empat macam kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, dan kemiskinan sosial-budaya (Gilarso, 2004)

1. Kemiskinan absolut menunjukan keadaan seseorang atau sekelompok masyarakat yang taraf hidupnya (pendapatannya) yang begitu rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (makanan dan bukan makanan).
2. Kemiskinan relatif berkaitan dengan pembagian pendapatan nasional di antara berbagai lapisan masyarakat, yaitu berapa bagian (%) yang diperoleh golongan masyarakat yang satu dibandingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya.
3. Kemiskinan Struktural menunjukan pada ketidakmampuan warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang disebabkan oleh (sebagai akibat dari) struktur masyarakat yang menghalanginya.
4. Kemiskinan sosial budaya ialah kemiskinan yang disebabkan oleh atau berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat. Misalnya, pandangan masyarakat terhadap nilai kerja, terhadap waktu, dan terhadap alam sekitar dapat menyebabkan suatu masyarakat tertinggal.

**Belanja Modal**

 Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan, 2006). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah membangun sendiri atau membeli. Menurut Halim (2007), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik dan menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya.

 Belanja modal dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dalam penelitian sebelumnya terdapat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa belanja modal memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu peneliti ingin melihat juga apakah di Provinsi Kalimantan Tenga Belanja modal juga memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang umum dipergunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-negara berkembang karena pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Kesejahteraan sosial merupakan cara untuk mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan sosial secara objektif yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kepuasan individu dalam masyarakat (Badrudin, 2012). Maka dapat dikatakan bahwa apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi maka akan disertai dengan meningkatnya kesejhateraan masyarakat.

 Dalam teori Keynesian, pengeluaran pemerintah memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi, dimana ketika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah maka akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi dilihat dari pendapatan dan tingkat output (Mankiw, 2003). Upaya penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari jumlah pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah yang terus meningkat setiap tahun diharpkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Pengeluaran pemerintah juga tidak hanya melihat jumlahnya saja tapi juga melihat ketepatan sasaran dalam pengeluaran pemerintah (De Fina, 2002).

**Tenaga Kerja**

 Tenaga kerja merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak tenaga kerja berkualitas yang tersedia, maka output yang dihasilkan akan semakin banyak, sehingga akan mempengaruhi pendapatan perkapita. Ketika pendapatan perkapita naik maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat (Risnawati dkk., 2019). Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sebagai modal untuk pembangunan daerah akan menjadi jalan untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi (Pascual, 2006). Ada dua tantangan besar di lingkungan domestik dan internasional yang sulit diprediksi, yaitu penciptaan lapangan kerja yang lebih baik dan lebih aman serta peningkatan produktivitas demi memperbaiki standar hidup dan mengurangi kemiskinan (Sarah & Chris, 2017). Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah terlebih dahulu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian didistribusi atau memberikan dampak terhadap daerah-daerah dalam tingkat kesejahtraan dan menurunkan tingkat kemiskinan yang terdapat di daerah (Balisacan et al., 2003 dalam Lufi Supratiyoningsih, 2022).

**Indeks Pembangunan Manusia**

 Hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah seringkali cenderung hanya diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Jika dari ekonomi pembangunan tersebut dihasilkanpertumbuhan ekonomi yang tinggi maka dikatakan pembangunan ekonomi di negara atau daerahtersebut telah berhasil. Padahal dalam kenyataannya seringkali terjadi kondisi yang cukupkontrakdiktif, yaitu walaupun telah dicapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu negara ataudaerah tetapi kondisi kesejahteraan masyarakatnya masih rendah, sehingga sering dikatakan banyakahli bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan kurang berkualitas.Pembangunan manusia pada dasarnya mempunyai empat komponen utama yaitu produktifitas (productivity), pemerataan (equity), kesinambungan (sustainability), dan pemberdayaan (empowerment). Melalui peningkatan keempat komponen tersebut secara maksimal makapembangunan manusia akan dapat berhasil dengan baik, yang dicirikan oleh peran manusia sebagaiagen pembangunan yang efektif. Untuk mencapai hal itu maka produk suatu negara atau daerah paling tidak harus memiliki peluang berumur panjang dan sehat, memiliki tingkat pendidikan yang memadai,serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktifsehingga memiliki pendapatan yang cukup dan memiliki daya beli serta kemauan untuk melakukankonsumsi bagi pemenuhan kebutuhannya (Feriyanto, 2014).Manfaat Indeks Pembangunan ManusiaMenurut Feriyanto (2014) Perhitungan IPM dapat dilakukan untuk setiap tahun dan manfaatperhitungan IPM di antaranya adalah:

1. Sebagai salah satu indikator untuk pertandingan relatif kinerja antar daerah di Indonesia sehingga dapat digunakan untuk menentukan peringkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam keberhasilanpembangunan manusia di wilayahnya.
2. Sebagai indikator untuk mengetahui perkembang kinerja pembangunan manusia di suatu wilayahbaik secara total (IPM) atau perkembangan indeks masing-masing komponen IPM.

**Penelitian Terdahulu**

 Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan Belanja modal, tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia di indonesia telah banyak dilakukan dengan menguji berbagai variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dengan periode yang berbeda-beda. Salah satunya, pada penelitian Ali hardana (2024) dengan judul penelitian Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan dan Belanja Modal Pemerintah Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia (Analysis of the Relationship between Growth Economy and Poverty and Local Government Capital Expenditures, Labour Absorption, and Human Development Index), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja modal pemerintah daerah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara, Tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara, Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yolanda, C., & Zulkarnain, M. (2019), dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Belanja Modal dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Timur, dimana hasil penelitiannya menunjukkan belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan penelitian yang dilakukan Ghina Nabila Ali (2023), dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Dan Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pengentasan Kemiskinan, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tenaga kerja pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama sepuluh tahun menunjukkan pengaruh yang negative dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

 Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah.

**Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk time series dari tahun 2014 sampai dengan 2023 dan data cross section yang terdiri atas 14 kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga merupakan pooled data yaitu gabungan antara data time series (tahun 2014-2023 : 10 tahun) dengan data cross section 14 kabupaten / kota. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang berupa referensi statistik, terbitan berkala, buku, serta dokumen.

**Teknik Analisis**

 Untuk memenuhi tujuan dalam penelitian ini serta menguji hipotesis yang telah ditetapkan maka dilakukan analisis jalur (path analysis) (Herlambang et al., 2022; Siregar & Hardana, 2022). analisis jalur merupakan pengembangan dari model regresi yang digunakan untuk menguji kesesuaian (fit) dari matrik korelasi dari dua atau lebih model yang dibandingkan oleh si peneliti. Model biasanya digambarkan dengan lingkaran dan anak panah yang menunjukkan hubungan kausalitas. Path analysis atau analisis jalur adalah analisis model kausal dari variabel independent (eksogen), variabel antara (endogen), dan variabel dependen serta semua variabel terukur. Berdasarkan studi teoritik dan empirik sebelumnya, kerangka konseptual dalam penelitian ini secara lengkap digambarkan sebagai berikut : Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi Propinsi Kalimantan Tengah sebagai (Y); stok modal fisik dan modal manusia dilihat melalui : (1) realisasi belanja modal pemerintah daerah (BM), (2) Human Development Indeks atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan (3) tenaga kerja terserap dilihat dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja (L) sedangkan untuk kemiskinan diwakili dengan P. Sedangkan untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya menggunakan uji normalitas, uji Variance Inflation Factor (VIF) serta menguji hipotesis.

**Hasil Analisis Dan Pembahasan**

**Normalitas**

dari hasil penngolahan data didapat bahwa nilai sig.kolmogrof -smirnov substruktural 1 sebesar 0,123 dan nilai sig.kolmogrof -smirnov substruktura 2 sebesar 0,200 >0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian dalam pengujian data untuk path analysis yang dilakukan dengan uji normalitas tunggal maupun normalitas residuals, tidak ada bukti bahwa data yang digunakan tidak terdistribusi tidak normal, oleh karena itu asumsi normalitas telah terpenuhi dan daya yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam estimasi selanjutnya.

**Multikolinearitas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karene VIF 1/tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir (Ghozali, 2016: 103).

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 26 dapat disimpulkan bahwa Nilai VIF (Variance Inflation Factor) untuk semua prediktor harus di bawah 10. Semua nilai VIF dalam Hasil pengolahan data jauh di bawah 10, yang menunjukkan tidak terjadi masalah multikolinearitas, dan dapat menganalisis parameter estimate untuk langkah selanjutnya.

**Pengujian Hipotesis**

1. **Hasil Uji Hipotesis sub struktural 1**
2. **Hasil pengujian koefisien determinasi (R2)**

|  |
| --- |
| **Model Summaryb** |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | ,505a | ,255 | -,117 | 2,72749 | 2,028 |
| a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2 |
| b. Dependent Variable: Y1  |
| Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai adjusted R square adalah -0,117 atau -11,7%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel BM, TKT dan IPM tidak mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi (PE) di kalimantan tengah karena menunjukkan hasil -11,7%, dan sisanya dapat dijelaskan olrh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam variabel penelitian ini.1. **Hasil uji F**
 |
| **ANOVAa** |
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 15,312 | 3 | 5,104 | ,686 | ,593b |
| Residual | 44,635 | 6 | 7,439 |  |  |
| Total | 59,947 | 9 |  |  |  |
| a. Dependent Variable: Y1 |
| b. Predictors: (Constant), x3, x1, x2 |

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 0,686 lebih kecil dari F tabel yaitu 4,757 dan sig yaitu 0,593 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan dengan kata lain model regresi secara keseluruhan tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tergantung. Oleh karena itu, hipotesis nol tidak dapat ditolak.

1. **Hasil uji T**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 95,388 | 146,549 |  | ,651 | ,539 |  |  |
| x1 | ,012 | ,106 | ,058 | ,111 | ,915 | ,452 | 2,213 |
| x2 | -,283 | 1,003 | -,182 | -,282 | ,788 | ,298 | 3,358 |
| x3 | -1,024 | 1,110 | -,567 | -,923 | ,392 | ,328 | 3,044 |
| 1. Dependent Variable: Y1

Sumber : data diolah |

Pengaruh variabel x1, x2, x3 terhadap variabel Y1 secara parsial dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil uji t pada variabel x1, x2, dan x3 diatas lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,446 dan nilai sig lebih besar dari 0,05, artinya variabel x1, x2 dan x3 secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah.

1. **Hasil uji hipotesis sub struktural 2**
2. **Hasil pengujian R2**

|  |
| --- |
| **Model Summaryb** |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | ,953a | ,908 | ,834 | ,16702 | 1,096 |
| a. Predictors: (Constant), Y1, x2, x1, x3 |
| b. Dependent Variable: Y2 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,834 atau 83,4%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel x1, x2, x3 dan y1 mampu menjelaskan variabel kemiskinan (Y2) di kalimantan tengah sebesar 84,4%, sedangkan sisanya yaitu 15,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

1. **Hasil uji F**

|  |
| --- |
| **ANOVAa** |
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 1,372 | 4 | ,343 | 12,295 | ,008b |
| Residual | ,139 | 5 | ,028 |  |  |
| Total | 1,511 | 9 |  |  |  |
| a. Dependent Variable: Y2 |
| b. Predictors: (Constant), Y1, x2, x1, x3 |

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 12,295 lebih besar dari nilai F tabel yaitu 5,192 dan nilai sig yaitu 0,005 lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel BM, TKT, IPM dan PE berpengaruh terhadap kemiskinan di Kalimantan Tengah.

1. **Hasil uji t**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 2,748 | 9,286 |  | ,296 | ,779 |  |  |
| x1 | ,009 | ,006 | ,296 | 1,461 | ,204 | ,451 | 2,218 |
| x2 | ,121 | ,062 | ,491 | 1,961 | ,107 | ,294 | 3,402 |
| x3 | -,097 | ,073 | -,339 | -1,337 | ,239 | ,288 | 3,476 |
| Y1 | ,053 | ,025 | ,335 | 2,126 | ,087 | ,745 | 1,343 |
| 1. Dependent Variable: Y2

Sumber: data diolah |

 Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

Hasil uji t pada variabel x1, x2, x3 dan y1 diperoleh nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,5705 dan nilai sig lebih besar dari 0,05, artinya variabel x1, x2, x3 dan y1 tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Y2) di kalimantan tengah. Maka H0 diterima dan Ha ditolak.

**UJI SOBEL**

1. **pengaruh x1 terhadap y2 melalui y1**

 Berdasrkan hasil uji sobel diperoleh nilai t hitung (-0,943429153) < t tabel (2,446911851) artinya x1 tidak berpengaruh terhadap y2 melalui y1, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

1. **Pengaruh x2 terhadap y2 melalui y1**

Berdasarkan hasil uji sobel diperoleh nilai t hitung (-0,09452228)< t tabel (2,446911851) maka x2 tidak berpengaruh terhadap y2 melalui y 1.

1. **Pengaruh x2 terhadap y2 melalui y1**

Berdasarkan hasil uji sobel diperoleh nilai t hitung (-1,15655463) < t tabel (2,44691185) maka x3 tidak berpengaruh terhadap y2 melalui y1

**Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh belanja modal pemerintah daerah, tenaga kerja terserap, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (studi kasus 14 kabupaten / kota di Provinsi Kalimantan Tengah), dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. nilai substrural 1 secara parsial Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Tidak Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Tengah, Hasil uji t pada variabel x1, x2, dan x3 diatas lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,446 dan nilai sig lebih besar dari 0,05, artinya variabel x1, x2 dan x3 secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah.
2. Nilai substruktural 2 secara parsial Hasil uji t pada variabel x1, x2, x3 dan y1 diperoleh nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,5705 dan nilai sig lebih besar dari 0,05, artinya variabel x1, x2, x3 dan y1 tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Y2) di kalimantan tengah. Maka H0 diterima dan Ha ditolak.
3. Secara simultan nilai sub 1 bahwa nilai F hitung sebesar 0,686 lebih kecil dari F tabel yaitu 4,757 dan sig yaitu 0,593 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan dengan kata lain model regresi Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia secara keseluruhan tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tergantung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Secara simultan nilai sub 2 bahwa nilai F hitung sebesar 12,295 lebih besar dari nilai F tabel yaitu 5,192 dan nilai sig yaitu 0,005 lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel BM, TKT, IPM dan PE berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Tengah.
5. Berdasarkan hasil uji sobel dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh X1,x2 dan x3 terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di provinsi kalimantan tengah

 **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna bagi pemerintah daerah dan masyarakat serta untuk penelitian yang akan datang, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berpotensi berpengaruh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk menurunkan angka kemiskinan, Diperlukan upaya bersama dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan stakeholder terkait untuk menurunkan kemiskinan.

**Referensi**

Badan pusat statistik provinsi kalimantan tengah Kalteng*.bps.go.id:*[*https://kalteng.bps.go.id/*](https://kalteng.bps.go.id/): Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah 2014-2023

Badan pusat statistik provinsi kalimantan tengah Kalteng.*bps.go.id:*[*https://kalteng.bps.go.id/*](https://kalteng.bps.go.id/): tenaga kerja terserap Provinsi Kalimantan Tengah 2014-2023

Badan pusat statistik provinsi kalimantan tengah Kalteng.bps.go.id: [*https://kalteng.bps.go.id/*](https://kalteng.bps.go.id/)*:* Pertumbuhan Ekonomi Provinsi kalimantan Tengah periode 2014-2023

BPS Provinsi Kalimantan Tengah Kalteng.bps.go.id: [*https://kalteng.bps.go.id/*](https://kalteng.bps.go.id/) tingkat kemiskinan yaitu presentase penduduk miskin provinsi kalimantan tengah periode 2014-2023

Kementerian Keuangan Republik Indonesia [djpk.kemenkeu.go.id]. Portal Data SIKD [2: [*https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd*](https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd)] (diakses 10 Maret 2024). Belanja modal pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2014-2023

Daniar, E. (2016). *Pengaruh Belanja Modal dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Putro, P. B. W., Mintarti, S., & Wijaya, A. (2017). Analisis determinasi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, *13*(2), 121-126

Anshori, T. (2013). *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tenaga Kerja dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2006-2010* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Pamuji, A. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Serta Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Al-Ashr: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, *4*(1), 113-131.

Wididarma, K., & Jember, M. (2021). Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, *10*(7), 2982-3010.

Aryanto, W., & Handaka, R. D. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, *2*(2), 52-63.

Supratiyoningsih, L., & Yuliarmi, N. N. (2022). Pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, *11*(01), 1.

Utami, F. P. (2020). Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), kemiskinan, pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, *4*(2), 101-113.

Agustini, Y., & Kurniasih, E. P. (2017). Pengaruh Investasi PMDN, PMA, dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. In *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* (Vol. 6, Issue 2).

Hardana, A., Nasution, J., Damisa, A., Lestari, S., Zein, A. S., Islam, U., Syekh, N., Hasan, A., Padangsidimpuan, A. A., & Utara, S. (2023). *Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan dan Belanja Modal Pemerintah Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia (Analysis of the Relationship Between Growth Economy with Poverty and Local Government Capital Expenditures, Labour Absorption, and Human Development Index) Riwayat Artikel*. *3*(1), 41–49. Https://doi.org/10.35912/jastaka.v3i1.2407

Kaligis, E., Engka, D. S. M., Tolosang, K. D., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (n.d.). *Pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan di minahasa utara melalui pertumbuhan ekonomi sebagai intervening variabel effect of capital expenditure on poverty in north minahasa through economic growth as intervening variables*.

Kristin, A., Uin, P., Semarang, W., Sulia, U., Uin, S., & Abstrak, W. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengagguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, *6*(2), 217–240.

Prayitno, B., & Yustie, R. (2020). Pengaruh tenaga kerja, ipm dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di jawa timur tahun 2014-2018. In *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi* (Vol. 16, Issue 1).

Putri, F., Mahasiswa, U., Ilmu, M., & Usu, E. (2020). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh*. *4*(2).

Sendouw, A., arumate, V., & Ch Rotinsulu, D. (n.d.). *Pengaruh belanja modal, belanja sosial, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di kota manado*.

Supratiyoningsih, L., & Yuliarmi, N. N. (2022). *E-JURNAL EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA*. *11*(01), 1–14. Https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/

Tarumingkeng, W. A., Rumate, V. A., & Rotinsulu, T. O. (2018). Pengaruh belanja modal dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (ipm) di provinsi sulawesi utara. In *Jurnal Pembanguan Ekonomi dan Keuangan Daerah* (Vol. 19, Issue 2).

Widianto, A., Unggul, E., Utami, S., & Nurmansyah, A. L. (n.d.). *Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Tegal)*. www.djpk.depkeu.go.id

Bisnis, J., & Ekonomi, D. (n.d.). *32 Santi Nurmainah*.